

# Analisis Tata Kelola Keuangan Tahunan Daerah sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Kab. Bogor Jawa Barat 2025

Sri Ayu Nurul Fadilah <sup>1\*</sup>, Moh. Ramadhani <sup>2</sup>, Eva Hany Fanida <sup>3</sup>, Revienda Anita Fitrie <sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\* [25040674162@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674162@mhs.unesa.ac.id)

## Abstract

Sustainable development at the regional government level requires effective financial governance to ensure that public resources are managed transparently, accountably, and oriented toward improving community welfare. This study aims to analyze the role of regional financial governance in supporting sustainable development in Bogor Regency until 2025. This research is important because regional governments still face challenges related to budget effectiveness, social inequality, and equitable distribution of development outcomes. This study employed a quantitative approach with a descriptive-causal design using secondary data for the 2021–2025 period obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS). The data were analyzed through descriptive analysis and regression analysis to examine the contribution of regional financial governance to sustainable development indicators. The results show that Bogor Regency achieved 96.14% realization of regional revenue and 87.23% realization of regional expenditure at the end of 2025, indicating improved fiscal capacity and relatively effective budget management. However, several challenges remain, particularly in reducing gender inequality and improving community welfare, as reflected in the Gender Inequality Index and poverty indicators. The findings imply that strengthening regional financial governance requires not only increasing fiscal capacity but also improving budget allocation quality, transparency, accountability, and performance-based evaluation to ensure that public spending generates sustainable social, economic, and environmental benefits. The implication of this study is that local governments should optimize budget planning and implementation strategies to support inclusive and sustainable development. Therefore, this study aims to provide empirical evidence regarding how regional financial governance contributes to achieving sustainable development goals at the local government level, particularly in Bogor Regency.

**Keywords:** *Regional Financial Governance; Sustainable Development; Budget Management; Fiscal Performance; Bogor Regency*

## Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya (Putra et al., 2024; Suriadi et al., 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rios et al., 2024; Kurrohman & Oktaviani, 2025; Manes Rossi et al., 2025). Oleh karena itu, tata kelola keuangan daerah memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen utama dalam membiayai

pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kurrohman & Oktaviani, 2025).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang mencerminkan prioritas dan arah pembangunan pemerintah daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan wilayah, dan penyediaan pelayanan publik (Mahdalena & Boki, 2022; Mointi et al., 2024; Siregar et al., 2025). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga oleh keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Analisis APBD melalui indikator kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan desentralisasi fiskal dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan (Wibisono et al., 2026). Selain itu, penerapan standar belanja dan standar harga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyusunan APBD (Sinabutar et al., 2026).

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (Astiana & Khoirunurrofik, 2024; Fatimah et al., 2024; Kurniawan et al., 2024). Namun, kewenangan fiskal yang semakin besar juga menuntut kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang memadai. Tanpa tata kelola yang baik, desentralisasi fiskal dapat menimbulkan permasalahan berupa rendahnya efektivitas belanja, tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, lemahnya akuntabilitas, serta belum optimalnya kontribusi anggaran terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah (Astiana & Khoirunurrofik, 2024).

Kajian mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa kewenangan fiskal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai. Namun, dampak tersebut tidak selalu sama antar wilayah karena dipengaruhi oleh karakteristik daerah, kapasitas fiskal, struktur pendapatan dan belanja, kualitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan (Astiana & Khoirunurrofik, 2024). Efisiensi belanja daerah juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan realisasi pengeluaran dan menyesuaikan prioritas fiskal (Kusuma et al., 2026). Dengan demikian, besarnya kapasitas fiskal perlu diikuti oleh kualitas pengelolaan dan ketepatan alokasi anggaran agar dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih luas.

Selain kapasitas fiskal, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta penganggaran tetap menjadi isu penting dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menyusun kebijakan anggaran, tetapi tetap berada dalam kerangka pengendalian, pembinaan, dan evaluasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Indonesia berada dalam hubungan yang dinamis antara otonomi fiskal dan pengendalian nasional. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus kebutuhan spesifik masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Fatimah et al., 2024).

Tantangan tata kelola keuangan daerah juga berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan dievaluasi, sedangkan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun sosial (Ríos et al., 2024; Parindingan et al., 2024; Purwanti, 2024). Penganggaran dan pelaporan merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas informasi keuangan karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Ripansa & Blongkod, 2026). Dalam era digital, sistem informasi keuangan daerah dan *e-budgeting* juga dapat memperkuat keterbukaan informasi dan jejak audit, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, integrasi data, komitmen kelembagaan, dan budaya birokrasi yang mendukung keterbukaan (Nurlina, 2025).

Tata kelola anggaran yang baik selanjutnya perlu diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan, bukan hanya pada tingginya tingkat penyerapan anggaran. Evaluasi efektivitas belanja modal perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial serta keberlanjutan hasil pembangunan, bukan semata-mata realisasi anggaran (Intaniaputri et al., 2026). Perspektif tersebut menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah seharusnya tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tata kelola keuangan perlu menghubungkan dimensi fiskal dengan keluaran dan dampak pembangunan.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Barat dengan dinamika pembangunan yang kompleks. Jumlah penduduk yang besar, aktivitas ekonomi yang beragam, luas wilayah, serta tingginya kebutuhan pelayanan publik menuntut tata kelola keuangan daerah yang efektif agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, APBD Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian daerah, serta pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif menjadi salah satu prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Data keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas realisasi anggaran dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator pembangunan. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp10,92 triliun atau 100,51% dari target, sedangkan realisasi belanja dan transfer mencapai Rp11,11 triliun atau 97,55% dari anggaran. Data perubahan KUA-PPAS tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan target pendapatan daerah dari Rp10,852 triliun menjadi Rp11,407 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5,145 triliun (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2025). Capaian tersebut menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat, tetapi realisasi anggaran yang tinggi belum dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai keberhasilan pembangunan apabila tidak dianalisis bersama manfaat dan hasil pembangunan yang dihasilkan.

Pada sisi pembangunan, Kabupaten Bogor masih menghadapi sejumlah tantangan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor tahun 2025 tercatat sebesar 74,53 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2025b). Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,547 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2025a). Garis kemiskinan Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp 531,41 ribu per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik,

2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal perlu diikuti oleh pengalokasian anggaran yang semakin efektif dan berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan dan tingginya tingkat realisasi anggaran belum secara otomatis menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perspektif ini, penganggaran berkelanjutan menjadi penting karena memungkinkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan pengalokasian APBD (Kurrohman & Oktaviani, 2025). Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga perlu dikaitkan dengan manfaat pembangunan yang dihasilkan sehingga evaluasi keuangan daerah tidak berhenti pada tingkat realisasi fiskal semata (Intaniaputri et al., 2026; Kusuma et al., 2026).

*Research gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan tata kelola keuangan daerah dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan secara komprehensif pada tingkat pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Bogor. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji dimensi tata kelola keuangan secara terpisah, seperti desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah, efektivitas dan indikator kinerja APBD, efisiensi belanja daerah, efektivitas belanja modal, maupun penganggaran dan kualitas laporan keuangan (Astiana & Khoirunurrofik, 2024; Wibisono et al., 2026; Kusuma et al., 2026; Intaniaputri et al., 2026; Ripansa & Blongkod, 2026). Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami pengelolaan fiskal daerah, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan kapasitas fiskal, pengelolaan APBD, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja dengan capaian pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kerangka analisis pada Kabupaten Bogor. Selain itu, karakteristik fiskal, demografi, kebutuhan pelayanan publik, dan permasalahan pembangunan setiap daerah berbeda sehingga temuan pada satu daerah tidak serta-merta dapat menggambarkan kondisi Kabupaten Bogor.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif integratif yang menempatkan tata kelola keuangan daerah tidak hanya sebagai mekanisme administratif pengelolaan APBD, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menghubungkan aspek kapasitas fiskal dan pengelolaan APBD, transparansi dan akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran dengan capaian pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu dalam konteks Kabupaten Bogor. Pendekatan tersebut berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada rasio kinerja fiskal, efisiensi belanja, efektivitas anggaran, atau kualitas pelaporan secara parsial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai sejauh mana kualitas tata kelola keuangan daerah berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor, khususnya melalui pengelolaan APBD, kapasitas fiskal, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian mengenai hubungan tata kelola keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi anggaran agar semakin berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

## **Metode**

### ***Pendekatan dan Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel berdasarkan data numerik yang diperoleh dari sumber resmi. Sementara itu, desain deskriptif-kausal digunakan untuk menggambarkan kondisi tata kelola keuangan daerah sekaligus menganalisis pengaruhnya terhadap indikator pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perkembangan data keuangan daerah dan indikator pembangunan, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara tata kelola keuangan daerah dan capaian pembangunan berkelanjutan selama periode pengamatan.

### ***Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengambil lokasi kajian di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan selama proses penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dianalisis mencakup periode tahun 2021–2025 sehingga dapat memberikan gambaran perkembangan tata kelola keuangan daerah dan indikator pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bogor selama lima tahun pengamatan.

### ***Data dan Sumber Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah. Data keuangan daerah diperoleh melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bogor periode 2021–2025. Data keuangan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, dan realisasi belanja daerah yang digunakan untuk mengukur indikator tata kelola keuangan daerah.

Data pembangunan berkelanjutan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya data yang berkaitan dengan kondisi pembangunan Kabupaten Bogor selama periode 2021–2025. Indikator yang digunakan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), garis kemiskinan, dan Indeks Ketimpangan Gender. Penggunaan data DJPK dan BPS dilakukan karena kedua lembaga tersebut menyediakan data resmi yang sesuai dengan variabel penelitian dan memungkinkan dilakukan analisis perkembangan kondisi fiskal serta pembangunan daerah secara antarwaktu (Badan Pusat Statistik, 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2025a, 2025b).

### ***Variabel Penelitian dan Pengukuran***

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tata kelola keuangan daerah yang dioperasionalkan melalui dua indikator, yaitu rasio otonomi keuangan daerah dan rasio efisiensi belanja daerah. Rasio otonomi keuangan daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam

mendukung pembiayaan pembangunan dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Rasio otonomi keuangan daerah dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Otonomi Keuangan Daerah} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Indikator kedua adalah rasio efisiensi belanja daerah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengelolaan belanja daerah dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi yang direncanakan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Rasio efisiensi belanja daerah dihitung menggunakan rumus:

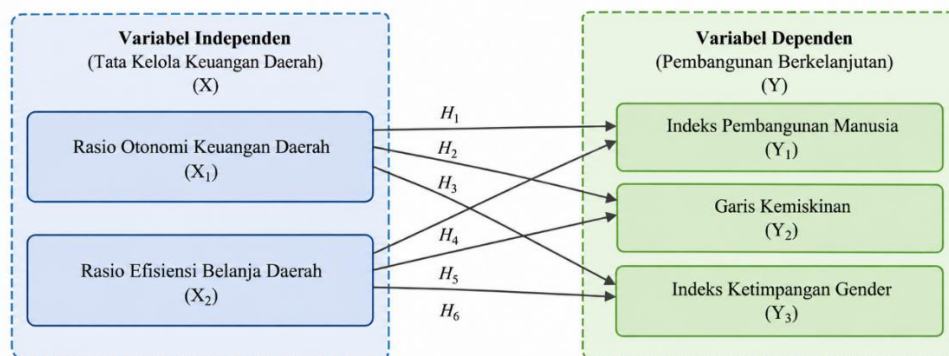
$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = (\text{Realisasi Belanja Daerah} / \text{Anggaran Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembangunan berkelanjutan yang direpresentasikan melalui tiga indikator sosial-ekonomi, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, garis kemiskinan, dan Indeks Ketimpangan Gender. IPM digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Garis kemiskinan digunakan untuk menggambarkan batas minimum pengeluaran yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk menggambarkan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan rasio otonomi keuangan daerah ( $X_1$ ) dan rasio efisiensi belanja daerah ( $X_2$ ) sebagai variabel independen, sedangkan pembangunan berkelanjutan direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_1$ ), garis kemiskinan ( $Y_2$ ), dan Indeks Ketimpangan Gender ( $Y_3$ ).

### Struktur Model Penelitian

Struktur model penelitian menggambarkan hubungan antara tata kelola keuangan daerah sebagai variabel independen dan pembangunan berkelanjutan sebagai variabel dependen. Tata kelola keuangan daerah direpresentasikan oleh rasio otonomi keuangan daerah ( $X_1$ ) dan rasio efisiensi belanja daerah ( $X_2$ ), sedangkan pembangunan berkelanjutan direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_1$ ), garis kemiskinan ( $Y_2$ ), dan Indeks Ketimpangan Gender ( $Y_3$ ). Hubungan antar variabel tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Model Penelitian

Berdasarkan struktur model tersebut, rasio otonomi keuangan daerah dan rasio efisiensi belanja daerah dianalisis keterkaitannya dengan masing-masing indikator pembangunan berkelanjutan. Model penelitian digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan antara perubahan tata kelola keuangan daerah dengan perkembangan IPM, garis kemiskinan, dan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Bogor.

### ***Prosedur Penelitian***

Penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan studi literatur mengenai tata kelola keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan. Tahap ini digunakan untuk menentukan permasalahan penelitian serta memperoleh dasar teoritis yang mendukung hubungan antar variabel. Tahap kedua adalah penyusunan kerangka konseptual dan perumusan hipotesis penelitian berdasarkan hasil kajian teori serta penelitian terdahulu. Tahap ketiga adalah penentuan variabel dan indikator penelitian yang terdiri atas rasio otonomi keuangan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, garis kemiskinan, dan Indeks Ketimpangan Gender. Tahap keempat adalah pengumpulan data sekunder periode 2021–2025 yang bersumber dari DJPK dan BPS. Tahap kelima adalah verifikasi, tabulasi, dan pengolahan data untuk memastikan konsistensi periode, kelengkapan, dan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian. Tahap keenam adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel penelitian. Tahap ketujuh adalah analisis hubungan antar variabel melalui uji korelasi dan analisis statistik sesuai dengan model penelitian. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil analisis, pembahasan dengan mengacu pada teori dan penelitian terdahulu, penarikan kesimpulan, serta penyusunan implikasi penelitian.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan perkembangan setiap indikator selama periode 2021–2025. Analisis meliputi perkembangan PAD, total pendapatan, anggaran dan realisasi belanja, rasio otonomi keuangan, rasio realisasi belanja, IPM, persentase penduduk miskin, dan IKG. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian analitis untuk menunjukkan pola peningkatan, penurunan, maupun fluktuasi antar periode. Tahap kedua adalah analisis korelasional eksploratif untuk mengidentifikasi arah dan kecenderungan keterkaitan antara indikator tata kelola keuangan daerah dan indikator pembangunan. Analisis dilakukan terhadap hubungan rasio otonomi keuangan dan rasio realisasi belanja dengan IPM, persentase penduduk miskin, dan IKG. Mengingat periode penelitian hanya mencakup lima observasi tahunan, hasil korelasi diinterpretasikan secara hati-hati. Koefisien korelasi digunakan sebagai informasi mengenai kecenderungan hubungan antar indikator dan tidak digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat. Atas pertimbangan jumlah observasi tersebut, penelitian tidak menggunakan analisis regresi berganda maupun uji asumsi klasik karena hasil estimasi berpotensi tidak stabil dan memiliki kemampuan inferensial yang terbatas.

### ***Pengolahan dan Interpretasi Data***

Data yang diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan variabel dan tahun pengamatan, kemudian disusun dalam bentuk tabulasi periode 2021–2025. Data keuangan digunakan untuk menghitung rasio otonomi keuangan dan rasio realisasi belanja setiap tahun, kemudian dibandingkan dengan perkembangan indikator pembangunan pada periode yang sama. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk mendukung analisis deskriptif dan korelasional. Hasil analisis diinterpretasikan dengan mempertimbangkan

arah perubahan setiap indikator, kondisi fiskal Kabupaten Bogor, serta keterbatasan jumlah observasi penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan keseluruhan pola perkembangan dan keterkaitan antar indikator. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan tata kelola keuangan daerah serta keterkaitannya dengan indikator pembangunan Kabupaten Bogor selama periode 2021–2025 tanpa menarik kesimpulan kausal yang melampaui kemampuan data.

## Hasil

### ***Perkembangan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2021–2025***

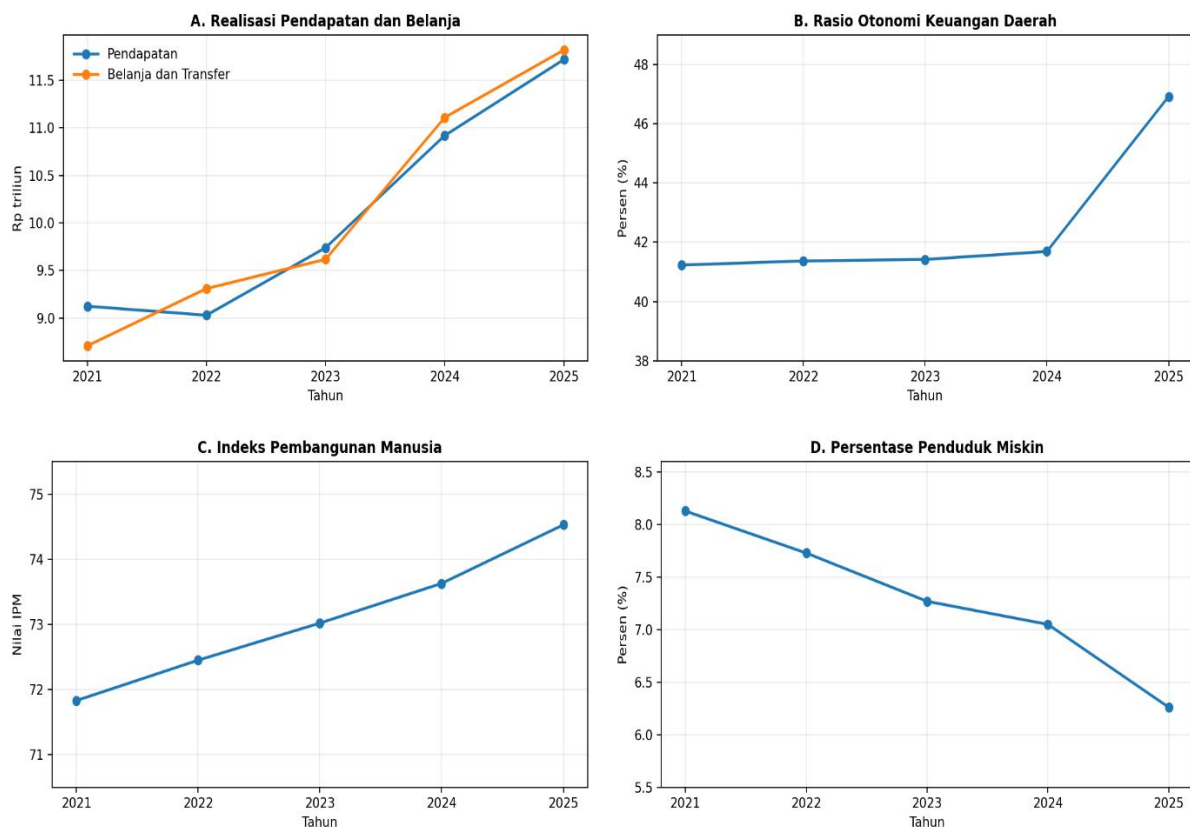
Analisis hasil penelitian dilakukan dengan mengamati perkembangan tata kelola keuangan daerah dan indikator pembangunan Kabupaten Bogor selama periode 2021–2025. Penyajian data dalam periode lima tahun dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kapasitas fiskal, pelaksanaan anggaran, serta perubahan kondisi pembangunan dibandingkan dengan penyajian yang hanya menggunakan data tahun 2025.

*Tabel 1. Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2021–2025*

| Tahun | Realisasi Pendapatan | Capaian Pendapatan | Realisasi Belanja dan Transfer | Capaian Belanja |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2021  | Rp9,125 triliun      | 104,50%            | Rp8,708 triliun                | 95,50%          |
| 2022  | Rp9,030 triliun      | 98,41%             | Rp9,310 triliun                | 94,43%          |
| 2023  | Rp9,740 triliun      | 99,42%             | Rp9,618 triliun                | 95,22%          |
| 2024  | Rp10,92 triliun      | 100,51%            | Rp11,11 triliun                | 97,55%          |
| 2025  | Rp11,72 triliun      | 95,79%             | Rp11,82 triliun                | 94,67%          |

Berdasarkan Tabel 1, nilai nominal pendapatan dan belanja Kabupaten Bogor secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode penelitian. Realisasi pendapatan meningkat dari sekitar Rp9,125 triliun pada 2021 menjadi Rp11,72 triliun pada 2025, sedangkan realisasi belanja dan transfer meningkat dari sekitar Rp8,708 triliun menjadi Rp11,82 triliun. Meskipun demikian, tingkat realisasi terhadap anggaran menunjukkan pola yang berfluktuasi. Capaian pendapatan tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 104,50%, sedangkan capaian belanja tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 97,55%. Perkembangan kapasitas fiskal juga dapat diamati melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Rasio otonomi keuangan relatif stabil pada kisaran 41% selama periode 2021–2024 dan meningkat pada akhir periode pengamatan. Perkembangan tersebut memberikan indikasi adanya penguatan kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah, meskipun sumber transfer tetap menjadi bagian penting dalam pembiayaan pemerintah daerah. Pada sisi pembangunan, IPM Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan secara konsisten dari 71,83 pada 2021 menjadi 74,53 pada 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2025b). Sementara itu, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 6,26% pada 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa indikator pembangunan sosial selama periode penelitian.

Untuk memperlihatkan pola perkembangan masing-masing indikator secara lebih ringkas, perkembangan tata kelola keuangan daerah dan indikator pembangunan disajikan pada Gambar 3.



Sumber: LPU/AFD/Ministry of Kabupaten Bogor dan BPS Kabupaten Bogor dan publikasi 2023.  
\* Nilai tahun keuangan 2022 menggunakan data PDB dan GDP tahun 2022 karena data belum selesai.

**Gambar 3. Perkembangan Tata Kelola Keuangan dan Indikator Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2021–2025**

Keterangan: (A) Realisasi pendapatan dan belanja daerah; (B) Rasio otonomi keuangan daerah; (C) Indeks Pembangunan Manusia; dan (D) Persentase penduduk miskin.

Gambar 3 menunjukkan bahwa secara nominal pendapatan dan belanja daerah cenderung meningkat selama periode pengamatan. Pada saat yang sama, rasio otonomi keuangan memperlihatkan kecenderungan meningkat terutama pada akhir periode, sedangkan IPM menunjukkan pola peningkatan yang relatif konsisten. Sebaliknya, persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun. Kesamaan pola tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kapasitas fiskal berlangsung bersamaan dengan perbaikan beberapa indikator pembangunan. Namun, pola tersebut tidak dapat secara langsung ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat. Perubahan indikator pembangunan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pemerintah yang tidak seluruhnya direpresentasikan oleh indikator keuangan daerah.

### **Perkembangan Ketimpangan Gender**

Selain IPM dan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan juga dianalisis melalui Indeks Ketimpangan Gender (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2025a). IKG Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,580 pada 2021, meningkat menjadi 0,588 pada 2022, kemudian menurun menjadi 0,582 pada 2023 dan 0,577 pada 2024. Penurunan nilai IKG setelah 2022 menunjukkan kecenderungan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Data IKG tahun 2025 tidak

dimasukkan dalam analisis numerik karena belum tersedia nilai yang dapat diverifikasi secara konsisten dengan seri sebelumnya.

### ***Analisis Keterkaitan Antar indikator***

Perbandingan perkembangan antar variabel menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah berlangsung bersamaan dengan peningkatan IPM dan penurunan persentase penduduk miskin. Namun, persentase realisasi belanja menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi dan tidak selalu bergerak searah dengan perubahan indikator pembangunan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator kualitas tata kelola keuangan. Besarnya realisasi anggaran perlu dilihat bersama dengan komposisi belanja, ketepatan sasaran program, efektivitas pelaksanaan, serta manfaat pembangunan yang dihasilkan. Analisis korelasional dalam penelitian ini digunakan secara eksploratif untuk melihat kecenderungan keterkaitan antar variabel. Mengingat data hanya terdiri atas lima observasi tahunan, hasil analisis tidak digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat. Pola hubungan lebih diposisikan sebagai bukti awal mengenai keterkaitan perkembangan fiskal dan indikator pembangunan Kabupaten Bogor selama periode 2021–2025.

### ***Sintesis Hasil Penelitian***

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Bogor mengalami peningkatan secara nominal selama periode 2021–2025. Pada saat yang sama, IPM menunjukkan peningkatan dan persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. IKG juga memperlihatkan kecenderungan menurun setelah 2022. Meskipun demikian, perkembangan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan atau belanja daerah secara langsung menyebabkan perbaikan indikator pembangunan. Hubungan antara tata kelola keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kualitas program, struktur belanja, waktu pelaksanaan, kondisi perekonomian, serta faktor sosial lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan anggaran, tetapi juga berdasarkan kualitas alokasi dan manfaat pembangunan yang dihasilkan.

### ***Keterbatasan Analisis***

Penelitian ini menggunakan data tahunan periode 2021–2025 sehingga hanya menghasilkan lima observasi untuk setiap variabel. Jumlah tersebut belum memadai untuk menghasilkan estimasi regresi berganda yang stabil. Oleh karena itu, analisis regresi dan uji asumsi klasik tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, sebagian data keuangan tahun 2025 masih berstatus belum diaudit dan data IKG tahun 2025 belum tersedia secara konsisten. Kondisi tersebut dinyatakan secara eksplisit sebagai keterbatasan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih tepat diposisikan sebagai analisis deskriptif dan korelasional eksploratif mengenai perkembangan tata kelola keuangan daerah dan pembangunan Kabupaten Bogor.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Kabupaten Bogor selama periode 2021–2025 mengalami perkembangan yang relatif positif dari sisi kapasitas fiskal, meskipun tingkat realisasi anggaran menunjukkan pola yang berfluktuasi. Realisasi pendapatan meningkat secara nominal dari sekitar Rp9,125 triliun pada 2021 menjadi Rp11,72 triliun pada 2025,

sedangkan realisasi belanja dan transfer meningkat dari sekitar Rp8,708 triliun menjadi Rp11,82 triliun pada periode yang sama. Namun, persentase realisasi pendapatan dan belanja tidak menunjukkan peningkatan secara linear. Capaian pendapatan tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 104,50%, sedangkan capaian belanja tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 97,55%. Pada 2025, nilai nominal pendapatan dan belanja merupakan yang tertinggi selama periode penelitian, tetapi tingkat realisasinya masing-masing sebesar 95,79% dan 94,67%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kapasitas fiskal tidak selalu diikuti oleh peningkatan tingkat realisasi anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dinilai melalui beberapa dimensi secara bersamaan karena peningkatan kapasitas fiskal dapat terjadi bersamaan dengan fluktuasi efektivitas pendapatan maupun realisasi belanja. Oleh karena itu, besarnya APBD tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola keuangan daerah karena evaluasi juga perlu mempertimbangkan kapasitas penerimaan, pelaksanaan belanja, serta manfaat pembangunan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya fiskal tersebut (Wibisono et al., 2026). Perkembangan rasio otonomi keuangan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kapasitas fiskal Kabupaten Bogor. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan relatif stabil pada kisaran 41% selama periode 2021–2024 dan menunjukkan peningkatan pada akhir periode pengamatan. Pola tersebut mengindikasikan adanya penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah sendiri. Peningkatan kontribusi PAD penting bagi pemerintah daerah karena dapat memperbesar ruang fiskal untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal. Optimalisasi PAD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan (Adelia et al., 2026).

Jika dikaitkan dengan hubungan antara otonomi keuangan daerah dan pembangunan manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi PAD berlangsung bersamaan dengan peningkatan IPM. IPM Kabupaten Bogor meningkat secara konsisten dari 71,83 pada 2021 menjadi 74,53 pada 2025. Secara deskriptif, pola tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah berjalan searah dengan peningkatan capaian pembangunan manusia. Namun, pola tersebut belum dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat karena perkembangan IPM juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, serta kondisi sosial masyarakat. Kapasitas fiskal yang semakin kuat dapat memperluas kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan membiayai program pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kapasitas fiskal dan struktur pengeluaran pemerintah daerah memiliki keterkaitan penting karena kemampuan fiskal yang semakin baik dapat mendukung pembiayaan pembangunan melalui alokasi anggaran yang lebih memadai (Aprilya & Jaenudin, 2026). Oleh karena itu, peningkatan otonomi fiskal Kabupaten Bogor dapat dipandang sebagai salah satu kondisi pendukung bagi pembangunan manusia, tetapi bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan IPM.

Hubungan antara realisasi belanja daerah dan IPM menunjukkan pola yang berbeda. Rasio realisasi belanja Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025, sedangkan IPM menunjukkan peningkatan secara konsisten. Tingkat realisasi belanja tertinggi terjadi pada 2024, tetapi peningkatan IPM telah berlangsung secara bertahap sejak 2021. Pola tersebut menunjukkan bahwa tingginya persentase penyerapan anggaran belum secara langsung menggambarkan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Tingkat penyerapan anggaran

pada dasarnya menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan, tetapi belum secara otomatis menunjukkan kualitas keluaran maupun manfaat pembangunan yang dihasilkan. Efektivitas belanja modal perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan tingkat realisasi anggaran, tetapi juga berdasarkan manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan pembangunan yang dihasilkan oleh belanja tersebut (Intaniaputri et al., 2026). Dengan demikian, hubungan antara belanja daerah dan IPM lebih tepat dilihat melalui kualitas alokasi, komposisi belanja, ketepatan sasaran program, serta manfaat yang diterima masyarakat daripada hanya berdasarkan besarnya persentase realisasi anggaran.

Pengelolaan APBD yang efektif juga membutuhkan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dan capaian pembangunan pada sektor-sektor prioritas. Keterlambatan penyerapan anggaran, lemahnya pengawasan, serta ketidaktepatan alokasi dapat mengurangi efektivitas APBD dalam menghasilkan manfaat pembangunan meskipun tingkat realisasi anggaran relatif tinggi (Tegar et al., 2026). Hasil penelitian ini dengan demikian menunjukkan bahwa penyerapan belanja yang tinggi perlu disertai dengan evaluasi berbasis keluaran dan hasil agar kontribusinya terhadap pembangunan manusia dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Pada dimensi kemiskinan, hasil penelitian memperlihatkan perkembangan yang cukup positif selama periode 2021–2025. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bogor menurun dari 8,13% pada 2021 menjadi 6,26% pada 2025, sedangkan jumlah penduduk miskin juga menunjukkan kecenderungan menurun. Pada periode yang sama, garis kemiskinan mengalami peningkatan karena perubahan nilai kebutuhan minimum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan garis kemiskinan tidak dapat ditafsirkan sebagai memburuknya kondisi kemiskinan karena indikator yang lebih tepat untuk menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin.

Jika dikaitkan dengan hubungan antara otonomi keuangan daerah dan kemiskinan, peningkatan kontribusi PAD pada akhir periode berlangsung bersamaan dengan penurunan persentase penduduk miskin. Secara deskriptif, pola tersebut sesuai dengan dugaan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, penurunan tingkat kemiskinan tidak dapat dinyatakan sebagai akibat langsung dari peningkatan PAD karena perubahan kemiskinan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, program pemerintah pusat, dan berbagai faktor sosial-ekonomi lainnya. Optimalisasi PAD seharusnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Tambahan kapasitas fiskal akan lebih bermakna apabila dialokasikan pada program yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, dan memperkuat kemampuan ekonomi kelompok rentan (Adelia et al., 2026).

Hubungan antara realisasi belanja daerah dan kemiskinan menunjukkan pola yang lebih kompleks. Tingkat realisasi belanja yang tinggi tidak selalu diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin dalam besaran yang sama pada tahun berjalan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena manfaat belanja publik, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sering kali membutuhkan waktu sebelum memberikan dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Struktur dan sasaran belanja juga menentukan sejauh mana anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat secara langsung bagi kelompok masyarakat miskin. Evaluasi pengeluaran daerah perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan realisasi anggaran sekaligus menyesuaikan prioritas fiskal

dengan kebutuhan pembangunan. Rasio realisasi belanja tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan pembangunan karena kualitas penggunaan anggaran dan orientasi belanja terhadap prioritas pembangunan turut menentukan manfaat yang dihasilkan (Kusuma et al., 2026). Dengan demikian, rasio realisasi belanja Kabupaten Bogor lebih tepat diposisikan sebagai indikator pelaksanaan anggaran daripada sebagai indikator langsung keberhasilan pengurangan kemiskinan.

Pada dimensi ketimpangan gender, data menunjukkan bahwa IKG Kabupaten Bogor sebesar 0,580 pada 2021, meningkat menjadi 0,588 pada 2022, kemudian menurun menjadi 0,582 pada 2023 dan 0,577 pada 2024. Penurunan IKG setelah 2022 memberikan gambaran adanya kecenderungan perbaikan karena semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Data tahun 2025 tidak digunakan dalam interpretasi utama apabila belum tersedia seri resmi yang dapat diverifikasi secara konsisten dengan periode sebelumnya. Jika dikaitkan dengan hubungan antara otonomi keuangan daerah dan IKG, perkembangan selama 2021–2024 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal pada akhir periode berlangsung bersamaan dengan kecenderungan penurunan ketimpangan gender. Secara substantif, keterkaitan tersebut dapat terjadi apabila peningkatan ruang fiskal dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan, pelayanan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, serta kesempatan partisipasi bagi perempuan. Namun, hubungan tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa peningkatan PAD secara langsung menyebabkan penurunan IKG karena perkembangan indikator gender juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional, karakteristik sosial masyarakat, dan program sektoral lainnya.

Pola realisasi belanja juga belum menunjukkan hubungan yang konsisten dengan perkembangan IKG. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tingginya tingkat penyerapan anggaran belum tentu menunjukkan bahwa anggaran telah dialokasikan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang berbeda. Pengelolaan APBD perlu berbasis data, transparan, akuntabel, dan diarahkan pada pemerataan pembangunan agar manfaat anggaran dapat diterima secara lebih merata oleh masyarakat (Tegar et al., 2026). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio otonomi keuangan memiliki pola perkembangan yang lebih konsisten dengan perbaikan indikator pembangunan dibandingkan dengan rasio realisasi belanja. Peningkatan kapasitas PAD berlangsung bersamaan dengan peningkatan IPM, penurunan persentase penduduk miskin, serta kecenderungan penurunan IKG pada akhir periode pengamatan. Sebaliknya, tingkat realisasi belanja menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi dan tidak selalu bergerak searah dengan perubahan indikator pembangunan.

Temuan tersebut tidak berarti bahwa belanja daerah tidak memiliki peran terhadap pembangunan. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa kualitas penggunaan belanja lebih penting daripada sekadar tingginya tingkat penyerapan anggaran. Analisis kinerja APBD perlu mempertimbangkan kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, pengelolaan pengeluaran, serta manfaat pembangunan yang diperoleh dari penggunaan anggaran daerah (Wibisono et al., 2026). Evaluasi belanja juga perlu menghubungkan realisasi anggaran dengan manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan pembangunan yang dihasilkan (Intaniaputri et al., 2026). Hasil penelitian ini juga memperkuat *research gap* yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Penilaian tata kelola keuangan daerah tidak cukup dilakukan hanya melalui rasio keuangan atau persentase penyerapan anggaran secara terpisah. Perbandingan antara perkembangan indikator fiskal dengan IPM, kemiskinan, dan ketimpangan gender selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan tingginya realisasi APBD tidak selalu

menghasilkan perubahan yang identik pada seluruh indikator pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tata kelola keuangan daerah dan pembangunan bersifat multidimensional serta sangat dipengaruhi oleh kualitas alokasi, ketepatan sasaran, efektivitas program, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Implikasi dari hasil penelitian adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mempertahankan penguatan PAD sebagai salah satu strategi peningkatan kapasitas fiskal, tetapi peningkatan penerimaan tersebut harus diikuti dengan penguatan kualitas belanja. Prioritas anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan gender. Perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas aparatur, pengendalian pelaksanaan anggaran, transparansi, serta evaluasi berbasis hasil diperlukan agar peningkatan kapasitas fiskal dapat diterjemahkan menjadi manfaat pembangunan yang lebih terukur (Tegar et al., 2026).

Mengingat penelitian ini menggunakan lima observasi tahunan, seluruh hubungan yang dibahas perlu diposisikan sebagai keterkaitan deskriptif dan eksploratif, bukan sebagai bukti hubungan kausal. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola yang relatif searah antara penguatan kapasitas fiskal dan perbaikan beberapa indikator pembangunan, sedangkan tingkat realisasi belanja belum memperlihatkan pola keterkaitan yang sama konsisten. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau data panel antardaerah agar hubungan antara tata kelola keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan dapat diuji dengan pendekatan inferensial yang lebih kuat.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah Kabupaten Bogor selama periode 2021–2025 memperlihatkan capaian yang relatif baik, terutama dari sisi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dan belanja. Pada tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,14% dan realisasi belanja sebesar 87,23% dari target anggaran. Pada sisi pembangunan, Kabupaten Bogor mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,53, Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,547, serta garis kemiskinan sebesar Rp531,41 ribu per kapita per bulan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa capaian pengelolaan keuangan daerah berlangsung bersamaan dengan perkembangan beberapa indikator pembangunan, tetapi penelitian ini belum dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara tata kelola keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan karena kedua aspek dianalisis secara deskriptif dan tidak diuji secara simultan melalui analisis statistik inferensial.

Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja daerah agar pengelolaan APBD semakin selaras dengan sasaran pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder, periode pengamatan 2021–2025, dan cakupan wilayah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hubungan atau pengaruh antara variabel tata kelola keuangan daerah dan indikator pembangunan berkelanjutan, memperluas wilayah serta periode penelitian, dan menambahkan variabel seperti kualitas layanan publik, digitalisasi pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta efektivitas program pembangunan.

## **Acknowledgment**

-

## Daftar Pustaka

- Adelia, N., Choiriyah, N., Hanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Analisis pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Malang. *Journal Social Society*, 6(3), 1721–1742. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1355>
- Aprilya, R., & Jaenudin, E. (2026). Pengaruh investasi dan belanja modal terhadap kapasitas fiskal daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel intervening. *Journal Social Society*, 6(2), 1257–1269. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1241>
- Astriana, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). Fiscal decentralization and governance performance: Empirical evidence from the district city level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tahun 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025a). *Indeks ketimpangan gender Kabupaten Bogor 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. <https://bogorkab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025b). *Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bogor 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. <https://bogorkab.bps.go.id>
- Fatimah, M., Haryanto, H., & Retnandari, N. D. (2024). Central-local government relations in regional planning and budgeting in Indonesia: Between autonomy and control. *Policy & Governance Review*, 8(2), 131–153. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922>
- Intaniaputri, N. F., Putri, S. A., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Efektivitas belanja modal dalam pembangunan infrastruktur Pahlawan Street Center Kota Madiun. *Journal Social Society*, 6(3), 1756–1766. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1376>
- Kurniawan, I., Djunaedi, O., & Akkapin, S. (2024). The application of the principle of decentralisation in regional autonomy. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 3(12), 1301–1308. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i12.2544>
- Kurrohman, T., & Oktaviani, S. A. (2025). Strengthening local government's role in implementing sustainable budgeting through environment-based budgeting in Indonesia. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(3). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i3.7196>
- Kusuma, K. R., Helmyawan, S. W., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analysis of regional expenditure efficiency in the management of the Tuban Regency budget during the COVID-19 pandemic. *Income Journal of Economics Development*, 6(2), 134–143. <https://doi.org/10.54065/ijed.6.2.2026.701>
- Mahdalena, M., & Boku, Z. (2022). Telaah kebijakan penyusunan anggaran pemerintah daerah. *Tangible Journal*, 7(1), 26–39. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.246>
- Manes Rossi, F., Brusca, I., Cohen, S., Caperchione, E., & Thomasson, A. (2025). Public financial management for sustainable development goals: Challenges, experiences, and perspectives. *Financial Accountability & Management*, 41(3), 484–489. <https://doi.org/10.1111/faam.12424>

- Mointi, R., Tumuhulawa, A., & Kadir, Y. (2024). Politik hukum pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif otonomi daerah dan demokrasi. *At-Tanwir Law Review*, 4(2), 108–125. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v4i2.3075>
- Nurlina, N. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas penganggaran publik: Analysis of public budgeting transparency and accountability. *AMANA: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 39–51. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/10>
- Parindingan, F. Y., Haliah, H., & Nirwana, N. (2024). Evaluation of transparency and accountability of regional government financial reports in the digitalization era. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1051–1058. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1066>
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2025). *Dokumen perubahan KUA-PPAS Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kabupaten Bogor. <https://bogorkab.go.id>
- Purwanti, A., Fresiliasari, O., Alfaruq, Z. A. M., Sudjono, S., & Sukomardojo, T. (2024). Participatory budgeting as a tool for enhancing government transparency and accountability: Case studies from emerging economies. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 265–281. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.58084>
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the Sustainable Development Goals into a regional development plan in Indonesia. *Sustainability*, 16(23), 10235. <https://doi.org/10.3390/su162310235>
- Ríos, A. M., Guillamón, M. D., & Benito, B. (2024). The influence of local government transparency on the implementation of the sustainable development goals in municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(4), 417–444. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2023-0229>
- Ripansa, M., & Blongkod, H. (2026). Penganggaran dan pelaporan kualitas laporan keuangan studi kasus di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Journal Social Society*, 6(3), 2443–2456. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1422>
- Sinabutar, E. N., Br. Manullang, G. G., & Maisyarah, R. (2026). Analisis penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga dalam penyusunan anggaran daerah Kota Medan tahun 2025. *Journal Social Society*, 6(3), 2591–2600. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1411>
- Siregar, S. N. S., Afriani, T., Rahman, S. A., Muda, I., & Mulia, A. (2025). Analysis of local government financial performance in the management of the 2024 Padangsidempuan City budget. *JIAR: Journal of International Accounting Research*, 4(2), 105–115. <https://doi.org/10.62668/jiar.v4i02.2303>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Tegar, P. R. F., Farrel, J. M. A., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analysis of APBD management in supporting regional development achievements in Lamongan Regency.

*Income Journal of Economics Development*, 6(1), 28–40.

<https://doi.org/10.54065/ijed.6.1.2026.685>

Wibisono, C. R., Salsabillah, F., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Kinerja keuangan pemerintah daerah Surabaya melalui indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Journal Social Society*, 6(3), 2492–2504.

<https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1491>